PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*

R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati¹, Made Warka²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Sukmaningrum112@gmail.com

Abstract

In the case of a post mortem investigation, it is very important to have it as a complement to the evidence of a case, as well as the family of the victim, which is used to complement the evidence of a case and reveal a case, which with the help of experts can make it easier in terms of handling which authority What is given to investigators is a law aimed at submitting expert testimony. The situation of Visum Et Repertum can be said to be important which is to overcome legal problems, namely the obstacles that occur, namely for investigators to be able to immediately make a request letter for Visum Et Repertum to victims who are asked to the doctor if there are victims who need to be asked for Visum Et Repertum to be examined immediately and preferably, for the family it is hoped that they can give permission to do a post-mortem for the purposes of investigation, and for the hospital so that the making of Visum Et Repertum can run smoothly. The purpose of this research is to find out the responsibility of the forensic doctor in the criminal act of counterfeiting in visum et repertum. In this study, using normative juridical methods were examined with library data which included primary and secondary laws.

Keywords: Forgery, Visum Et Repertum, Doctor's Responsibility.

Abstrak

Dalam hal penyidikan visum sangat penting adanya sebagai pelengkap alat bukti suatu perkara, serta pihak keluarga dari korban, yang dimana kegunaannya untuk pelengkap alat bukti suatu perkara serta mengungkapkan suatu perkara, yang dimana dengan adanya bantuan para ahli sehingga dapat mempermudah dalam hal penanganan yang dimana wewenang yang diberikan kepada penyidik yaitu undang-undang yang bertujuan untuk mengajukan keterangan para ahli. Keadaan Visum Et Repertum bisa dibilang penting yang mana untuk mengatasi permasalahan hukum yaitu hambatan-hambatan yang terjadi yakni bagi penyidik agar dapat dengan segera membuat surat permintaan Visum Et Repertum kepada korban yang dimintakan kepada dokter apabila terdapat korban yang perlu dimintakan Visum Et Repertum agar segera diperiksa dan lebih diutamakan, bagi pihak keluarga diharapkan dapat memberikan ijin untuk dilakukan bedah mayat guna kepentingan penyidikan, dan untuk pihak rumah sakit agar pembuatan Visum Et Repertum dapat berjalan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter forensik dalam tindak pidana pemalsuan dalam visum et repertum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif diteliti dengan data kepustakaan yang mencakup hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci: Pemalsuan, Visum Et Repertum, Pertanggungjawaban Dokter.

PENDAHULUAN

Dalam sistem negara hukum, hukum adalah cara utama di mana masyarakat diatur. Di Indonesia, ini berarti negara hukum Pancasila adalah dasar kehidupan bermasyarakat. Sistem

hukum ini didasarkan pada prinsip dan aturan atau norma yang ditemukan dalam masyarakat sipil. Artinya setiap warga negara Indonesia mempunyai suatu hak atas rasa bebas dan aman dari segala hal kejahatan dalam bentuk apapun.

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem hukum yang dapat membantu negara Republik Indonesia mencapai tujuannya, ada kalanya terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat meskipun semua undang-undang telah dipatuhi. Hal ini dikarenakan kriminalitas masih menjadi masalah di Indonesia. Adapun contoh tindak kejahatan ialah pembunuhan, pelecehan seksual, pencurian, perampasan, tindak kekerasan, penyalahgunaan zat serta obat, perampasan, dan pemalsuan surat (U & Salenda, 2021)

Kejahatan ialah suatu perlakuan yang dimana bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan dan norma hukum, dan tegasnya, jika orang dengan tegas menentukan bahwa perbuatan itu melanggar atau bertentangan dengan hukum, melanggar, sesuai atau bertentangan dengan larangan dari dan perintah aturan hukum yang berlaku di tempat tinggal orang yang bersangkutan. Terdapat beberapa definisi kejahatan dari para ahli:

1. David M. Gordon mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan usaha dari penjahat untuk bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang genting yang muncul dalam tatanan sosial tertentu.
2. Paul Mudigudo Moeriono menjelaskan bahwa kejahatan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma, dipandang merugikan dan meresahkan, tidak boleh berkembang di dalam masyarakat, tertanam dalam aturan pidana, dan membawa hukuman pidana. (Agung, 2008)

Pemeriksaan kasus dalam sebuah proses peradilan pada hakikatnya memiliki tujuan yang dimana untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam kasus tersebut. Hal seperti ini dapat dipandang dari beberapa perjuangan yang dimana telah dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang dimana diperlukan bukti-bukti yang telah diperoleh untuk mengungkapkan sesuatu perkara dari tahap pemeriksaan terdahulu seperti halnya penyidikan dan juga melakukan penuntutan juga yang dilakukan pada akhir tahap persidangan (Hertina, 2019)

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan moralitas manusia (amoral), perilaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatan yang bersifat anti sosial, dan perilaku yang melanggar hukum dan hukum pidana. KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah jenis perilaku yang melanggar hukum pidana. Penyelidik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa kejahatan telah dilakukan. Ini penting karena tidak semua penjahat membutuhkan visa untuk dianggap sebagai bukti dalam suatu kasus. seperti kejahatan yang dilakukan sang pihak dokter seperti melakukan pemalsuan dokumen yang dimana merupakan alat bukti pasien yaitu visum. (Agung, 2008)

Visum et repertum adalah salah satu contoh alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang menyangkut atau ada hubungannya dengan jiwa, pembunuhan, atau badan seseorang. Bukti ini penting dalam menentukan penyebab cedera atau kematian seseorang. Bukti ini dapat berupa mayat, laporan atau pernyataan dalam bentuk tertulis mengenai apa yang dilihat dan yang ditemukan dokter pada benda yang diperiksa.

Memanipulasi atau memalsukan dokumen, seperti hasil otopsi, dapat digolongkan sebagai kejahatan menurut KUHP. Pemalsuan surat merupakan salah satu perilaku yang dapat dilakukan dengan alat bukti semacam ini. Jika seorang dokter memalsukan surat, mereka dapat dijerat dengan Pasal 267 KUHP. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan sanksi etik dan disiplin bagi dokter tersebut. Bukti diperlukan untuk berhasil menuntut kasus pidana. Manipulasi atau pemalsuan barang bukti merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara.. (Yeremia Eddy Toar Rayer, Roy V. Karamoy, 2005)

Pemalsuan adalah kejahatan yang dimana dilakukan tanpa adanya persetujuan korban atau izin pelaku, dan pemalsu dituntut pertanggungjawaban pidana. Kejahatan ini dapat berdampak besar bagi dunia forensik, karena nantinya dapat digunakan untuk menuduh atau mencurigai seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, otopsi atau laporan dengan menggunakan dokumen palsu dapat digunakan untuk menentukan tersangka dalam kasus pembunuhan. (Nuralinda & Arafat, 2022)

Perbuatan memalsukan surat juga dapat diartikan sebagai “upaya mengubah surat sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli”. Terdapat beberapa cara untuk membuat surat menjadi berbeda dari yang asli, yaitu seperti mengurangi isi surat, menambah atau mengubah hal-hal tertentu pada surat, atau memalsukan tanda tangan pada surat. Sehingga perubahan tersebut menjadi lain dari aslinya. pada samping itu, dalam perbuatan memalsukan surat haruslah disertai menggunakan maksud serta tujuan berasal penggunaan surat itu dimana maksud dari pelaku ialah memakai atau bahkan mengutus orang lain buat memakai surat seakan akan surat tadi asli serta tidak dipalsu. merupakan, penggunaan surat palsu tersebut merupakan menjadi sarana atau alat buat memperdaya seseorang. dalam kaitannya menggunakan penggunaan tadi, haruslah memunculkan kerugian, walaupun kerugian yang sebagaimana dimaksud tidak perlu sudah ada. Kerugian yang mungkin terjadi telah cukup dimaknai sebagai kerugian.

Maraknya tindakan pemalsuan surat telah bukan hal yang tabu bahkan banyak dilakukan di negara Indonesia. Adapun contoh masalah Ferdy Sambo dimana seorang Dokter Forensik memalsukan surat yang akan terjadi visum yang digunaksan sebagai alat bukti yang telah sah dimana telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan bacaan kepustakaan untuk menemukan aturan-aturan hukum dan berbagai literatur melalui dokumen, jurnal, buku serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini adalah sarana yang tepat untuk mengembangkan wawasan pengetahuan yang disusun secara deskriptif dan terdiri dari bahan-bahn primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan *Visum Et Repertum*

Ketika kasus pidana sedang berlangsung, proses peradilan seringkali melibatkan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti. Jika bukti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan

dokter yang melakukan pemeriksaan mayat, hakim dapat memanggil dokter untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 180 KUHP. Saat bersaksi di pengadilan, dokter yang membuat bedah mayat ini dapat membantu mengklarifikasi masalah yang mungkin timbul. Jika hakim ketua merasa perlu, dokter dapat mengucapkan sumpah atau janji. (Pembunuhan et al., 2018)

Dokter adalah orang yang tahu banyak tentang kedokteran dan dianggap ahli dalam bidang ini. Dia memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan dia melakukannya dengan memeriksa dan mengobati orang yang sakit. Dokter mengikuti hukum ketika memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip etika suatu profesi, yang telah diatur oleh organisasi profesi yang bersangkutan. (Kawenas, 2019)

Hukum pidana Indonesia ini mengatur bagaimana hal mengenai pemalsuan segala sesuatu yang merupakan suatu bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana. Walaupun undang-undang tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang pemalsuan surat keterangan dokter, pasal 267 dan 268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat keterangan dokter. Surat palsu adalah surat yang berbeda dalam surat yang seharusnya tidak diubah. Hal ini dapat terjadi jika seseorang mengubah huruf lain dalam surat tersebut tanpa sepengetahuan orang yang mengirimkan surat tersebut. Namun, isi surat itu tetap harus sesuai dengan isi surat aslinya. Jika salah satu huruf pada surat palsu tersebut berbeda dengan huruf lain pada surat aslinya, maka isi surat palsu tersebut dapat berubah. (I Kadek Suar Putra Dana et al., 2021)

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sudah ada dalam hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemalsuan dokumen dipahami sebagai tindak memalsukan surat yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang Kejahatan. Secara umum, pemalsuan surat atau dokumen ini yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang dimana ada beberapa ketentuan bahwa :

1. "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

2. Jika seseorang menggunakan surat palsu untuk mencoba membuat orang lain percaya itu nyata, mereka akan dihukum dengan cara yang sama seperti seseorang yang mencoba menggunakan surat palsu untuk menyakiti seseorang. (Hanna Wijaya, 2021)

Ketentuan pemalsuan dimasukkan dalam KUHP. Namun UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengaturan tindak pidana terhadap pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan. Undang-undang hanya merujuk pada kewenangan penyidik, tidak ada satupun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana Tanpa Batas dan Hukum Acara Pidana. Selain itu, dokter yang diduga melanggar Pasal 7 KODEKI akan dirujuk ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”). Kode Profesi Dokter dan Dokter Gigi menurut Pasal 3.1 dan 2.r Peraturan Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2011 (“Peraturan KKI /2011”). Berkaitan dengan ketentuan KUHP dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, dimana adanya pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang memalsukan hasil otopsi dikenakan Pasal 267 dan 268 karena melakukan tindak pidana pemalsuan hasil otopsi. . pelaku yang memalsukan hasil visum melanggar pasal 189(2) pasal 36 Undang-Undang Kesehatan 2009, karena pelaku atau dokter belum memverifikasi kebenaran laporan dan informasi yang digunakan sebagai bukti; atau dokter. (Aurelia & Mahmud, 2022)

Selain sanksi pidana untuk tindak pidana pemalsuan dokumen oleh ilmuan forensik, juga terdapat sanksi pelanggaran etika kedokteran yang menyatakan bahwa hubungan dokter-pasien merupakan hubungan kepercayaan yang tinggi yang harus dibina secara profesional. Peraturan dalam hubungan ini telah ada dan terdapat pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sejak tahun 2012. Suatu hal yang harus dipahami pertama dimana adanya hukuman yang dijatuhkan adalah hasil keputusan manusia dan bukan hanya tanggapan kausal dari alam. Pihak atau organisasi yang memiliki kekuatan lebih besar dari pelakunya. Sanksi itu berupa pencabutan sementara atau pembekuan hak pelaku. Beratnya sanksi yang sudah ditentukan

oleh pengacara berdasarkan kerugian atau penderitaan yang didapatkan oleh para korban. Dalam hal ini syarat penjatuhan hukuman ini adalah pemegang kekuasaan menganggap dirinya bersalah, padahal sebenarnya ia tidak bersalah. Hal ini menjadikan sanksi sebagai salah satu buah kekuasaan yang bisa dipersalahgunakan. (Rozaliyani et al., 2018)

Sanksi Dokter Forensik yang Melanggar Kode Etik Kedokteran

Untuk mengeluarkan surat keterangan dokter, seorang dokter harus melengkapi persyaratan tertentu, antara lain surat izin praktek kedokteran. Hanya dokter yang dapat mengeluarkan surat keterangan dokter, dan barang siapa yang memalsukan atau melakukan pemalsuan pada surat keterangan dokter disebut sebagai melakukan tindak pidana. Jika dokter mengeluarkan surat keterangan palsu, maka dapat dituntut berdasarkan Pasal 263 KUHP. (Hanna Wijaya, 2021)

Ada tiga tahap secara umum dalam memberikan sanksi:

Tahap Pertama merupakan perumusan yang memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan. Hukuman wajib memberi pendidikan pelaku menggunakan nilai yang telah sesuai, mempertimbangkan kondisi pelaku dan rakyat secara luas. Pemberian hukuman pula wajib disertai penjelasan dan penegasan supaya pelaku mengerti bahwasanya ada peraturan yang harus dipatuhi. hukuman pula harus didapatkan dan juga diberikan dengan cara khusus supaya menghindari pertimbangan yang dimana tidak ada hubungan yang bisa mengalihkan perhatian dari adanya pelanggaran kode etik.

Tahap Kedua merupakan memilih berat dan ringan dari sanksi yang sesuai dengan adanya beberapa hal pertimbangan yaitu: jenis pelanggaran, berat maupun ringannya sesuatu yang dilanggar berdasarkan ketentuan yang telah berlaku, adanya riwayat pelanggaran, dan faktor penyebab lainnya. Selain itu wajib pula disertai berbagai upaya untuk keseimbangan antara hukuman aktif dan pasif. Jenis pelanggaran yang sebagaimana dimaksud merupakan anugerah hukuman menggunakan tata cara penjelasan dan penegasan terhadap tindakan yang dirancang, bukan terhadap suatu klausul peraturan semata, misalnya “Anda melanggar karena Anda mencuri” bukan sekedar berkata “Anda melanggar peraturan angka 5” tanpa

menyebutkan lebih rinci isi peraturan tadi. Hal ini memiliki tujuan supaya pelaku memahami jenis pelanggaran serta akibat yang mungkin timbul, bukan hanya menjelaskan klausul serta peraturan dari pelanggaran yang ada. Berat ringannya penyerbuan ditentukan berlapiskan kesepakatan atau ketetapan orientasi berkuasa tambah memikirkan berlebihan sekali syarat.. Riwayat penyerbuan bertalian mengabdikan perhitungan penyerbuan sebelumnya yang perpautan dilakukan pemeran, hormat penyerbuan sama juga tidak. Faktor pengiring yang wajib dipertimbangkan contohnya niat, situasi manusia di masa peristiwa, babak fasilitas kerjasama pemeran muka trik peradilan, akhir alkohol atau obat-obatan terlarang. saman juga wajib diberikan mengabdikan memikirkan asosiasi anjuran pasif (berwarna penghentian hak) juga aktif (berwarna kasih kewajiban) yang upas menyerahkan hukuman klise terhadap pemeran menimbrung biasa.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan sanksi maupun hukuman yang jekas serta diawasi. Hukuman yang sudah diberikan harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi bila terdapat pengulangan pelanggaran atau hal yang membuat terhambat apabila sanksi sedang dijalankan. (Library, 2006)

Dalam ORTALA (Organisasi dan Tata Kerja) MKEK, pengenaan sanksi terhadap terpidana dokter/pelanggar etik meliputi penyuluhan, teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (retraining), dan dari IDI dapat berupa pemecatan. . keanggotaan sementara atau berkelanjutan. Umumnya, sanksi etik tersebut, selain pemberhentian tetap dari keanggotaan atau kegiatan dalam keanggotaan akan dicabut seumur hidup serta diberikannya pembinaan. Mekanisme sanksi MKEK diawali dengan penyampaian pengaduan yang sah, dilanjutkan melalui proses review kasus pengaduan. Di akhir peninjauan, Ketua MKEK akan memutuskan apakah kasus tersebut dapat disidangkan oleh Badan Peninjau, yang melakukan pemeriksaan sambil menunggu keputusan MKEK. Jika bukti pelanggaran etik ditetapkan, Kongres akan menentukan sanksi yang sepadan dengan keseriusan malapraktik medis terdakwa. Penegakan sanksi dilakukan atas nama pengurus IDI secara setara dan oleh Bagian Pembinaan Etika Profesi MKEK atas nama mereka.. (Rozaliyani et al., 2018)

Bagi pihak tenaga medis yang mana harus melakukan pemalsuan dari rekam medis juga harus mendapatkan hukuman tambahan apabila dokumen dalam rekam medis ini digunakan dalam pengadilan sebagai alat bukti, yang secara tidak langsung ini para tenaga medis tersebut melakukan perusakan atas alat bukti yang akan digunakan sehingga tenaga medis dapat terkena pasal yang dimana dapat dikenakan pasal dapat merusak barang bukti. Menurut Soesilo penjelasan dalam pasal ini yang terkait dengan kejahatan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Yang dimana ada seseorang sengaja untuk merusak ataupun menghancurkan barang yang akan dikenakan (dipakai) untuk bukti bagi hakim akan dikenakan pidana.
- b. Yang dimana ada seseorang sengaja merusak atau menghancurkan dokumen yang diperintahkan untuk diarsipkan untuk barang bukti dan
- c. Sengaja untuk merusak/menghancurkan surat yang akan diserahkan kepada pihak lain untuk keperluan daripada bukti. (Semara Ratih & Purwani, 2019)

Dalam hal ini seseorang tenaga medis yang terkena pelanggaran etika kedokteran dimana hal ini bergantung pada beratnya pada pelanggaran etika tersebut. Tetapi jika melanggar maka akan diberi sanksi yaitu dengan cara memberi pendidikan agar pelanggaran yang sebelumnya tidak terulang kembali dan menjadi sesuatu pelajaran bagi Tenaga Medis, Dokter lain atas sanksi serta pelanggaran etika dapat berupa :

1. Hukuman atau tuntutan yang dilakukan secara lisan atau tulisan
2. Adanya dan juga pangkat
3. Penurunan gaji serta pangkat setingkat dimana kedudukannya lebih rendah
4. Dicabut izin praktik dokternya dengan sementara atau selama-lamanya
5. Kasus yang terkena pelanggaran etikolegi mendapatkan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang telah berlaku dan diproses ke pengadilan. (PRIYANTO, 2019)

Tindakan memalsukan surat ini mengartikan dimana semua bentuk tindakan ini yang dimaksudkan huruf yang semua bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk huruf yang ada dengan cara mengganti dengan mengubah separuh atau yang dimana seluruhnya berasal dari huruf yang dapat kita temukan dalam ketentuan ini yang berhubungan dengan kode dalam Pasal 263 ayat (1) yang dimana isinya ,engharuskan seseorang juga dapat dikatakan dapat

terkena tindakan pemalsuan apabila pihak lain menggunakan suatu huruf atau kalimat yang tidak sesuai seperti isi yang dipalsukan. Jika seseorang memalsukan dokumen, mereka dapat dihukum hingga 6 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 (1). Rumah Sakit Indonesia adalah anggota dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (RSUD) dan memiliki "Kode Etik Rumah Sakit Indonesia" (Kodersi) yang berisi semua rincian tentang nilai-nilai kekeluargaan yang digunakan sebagai pedoman bagi semua staf yang terlibat dalam operasional dan manajemen rumah sakit adapun pada Pasal 267 ayat (1) yang sudah tersusun rapi dengan norma-norma yang dijadikan pedoman..(I Kadek Suar Putra Dana et al., 2021)

Yang tercantum pada Pasal 46 UU No 1 mengenai Resolusi Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 dimana dijelaskan bahwa rumah sakit tersebut harus bertanggungjawab yang terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang membuka praktek di rumah sakit yang menjadi beban badan pemilik dan juga badan pengelola rumah sakit Oleh karena itu rumah sakit yang dimana berbadan hukum diberi status hukum "Person" dan "Recht Soon" dan rumah sakit juga menggunakan hak dan kewajiban atas dasar tindakannya yang dimana ketergantungan pada asanya tingkat kesalahan dalam perusahaan ataupun badan hukum yang disebut sebagai badan hukum yang dimana mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab. Jika rumah sakit melakukan kesalahan yang menyebabkan masalah keuangan bagi badan pemilik rumah sakit, atau jika badan pengelola rumah sakit tidak melakukan tugasnya dengan baik, rumah sakit mungkin harus memberi kompensasi kepada badan pemilik atas biaya tersebut. (Monita & Wahyudhi, 2013)

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter, dalam tindak pidana pemalsuan dan pengembalian sidik jari dokter tersebut diancam dengan pidana yang berat. Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter menurut KUHP, Pasal 263 s/d 276 KUHP Pasal 7 UU Etika Kedokteran, pemalsuan surat keterangan dokter dan sanksi pidana Pidana menurut Pasal 267 Ayat 1 KUHP adalah hingga 4 hukuman perdata dan administrasi serta hukuman pidana dengan

hukuman hingga satu tahun dapat dikenakan.. Dan terkena sanksi dalam ORTALA (Organisasi dan Tata Laksana Kerja) MKEK, pemberian hukuman mengenai dokter terhukum/pelanggar etik yang pertama diberikan nasihat selanjutnya di peringati secara lisan, diberikan peringatan tertulis, di berikan pembinaan perilaku, serta pendidikan (re-schooling), hingga dapat juga dipecat keanggotaan IDI, baik secara sementara atau pun permanen. Jadi jika memalsukan sertifikat medis, Anda dapat dihukum dengan hukuman penjara. Aturan pemalsuan surat keterangan dokter ada dalam KUHP, yang juga ada dalam Kode Etik Kedokteran. Jika Anda membuat informasi palsu tentang dokter dalam surat keterangan medis, Anda dapat dihukum dengan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. (2008). Tinjauan Tentang Kejahatan. *Tinjauan Tentang Kejahatan*, 21.
- Aurelia, A. N., & Mahmud, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 *Bandung Conference Series ...*, 36, 555–560.
- Hanna Wijaya, I. H. (2021). TINDAKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER. *TINDAKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER*, 26(2), 173–180.
- Hertina, M. F. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*. 1–25.
- I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 53–58. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3091.53-58>
- Kawenas, J. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. *Lex Crimen*, 8(8), 31–38.
- Library, U. I. (2006). *Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT . Lapindo Barantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo*.
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. 6(7), 127–141.
- Nuralinda, Z., & Arafat, M. R. (2022). *Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan alat bukti*. 37(2), 205–211.
- Pembunuhan, P., Sudarso, J. Y., & Timur, J. (2018). *Jurnal IUS Vol.VI No.02 September 2018*. 02, 43–62.
- PRIYANTO, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1), 1316–1331. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.107>
- Rozaliyani, A., Meilia, P. D. I., & Libritany, N. (2018). Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran

Etik Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(1), 19.
<https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.11>

Semara Ratih, G. A. N. A. D., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2019)*, 1–15.

U, N. A., & Salenda, K. (2021). Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21462>

Yeremia Eddy Toar Rayer, Roy V. Karamoy, C. S. T. (2005). *SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN HASIL AUTOPSI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL 267 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. 1.*